

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*. Kesatu. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Hasan, Djuhendah. *Sistem Hukum, Asas-Asas, Dan Norma Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia*. Pertama. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- HR, Dr. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Indra, Mexsasai, Oksep Adhayanto, and Pery Rehendra Sucipta. *Hukum Administrasi Negara*. Kesatu. Yogyakarta: Samudra Biru, 2004.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- . *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kadarwati, Tri. *Materi Pokok Perbandingan Administrasi Negara*. Kesatu. Tengerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- Kastanya, Efraim Jord. “Perbedaan Peraturan Dan Keputusan.” *Hukum Online*, 2023.
- Latif, Abdul. *Hukum Admnistrasi Negara Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Pertama. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Maulidiah, Sri. *Pelayanan Publik*. Pertama. Bandung: CV. Indra Prahasta, 2014.
- Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, and Christina Yulita Purbawati. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Pertama. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2018.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan UU PTUN 2004*. Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Admnistrasi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

- . *Urgensi Upaya Administrasi Di Indonesia*. Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Setijaningrum, Erna. *Inovasi Pelayanan Publik*. Pertama. Surabaya: PT. Medika Aksara Globalindo, 2009.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.379-398>.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi. *Pelayanan Publik*. Kedua. Malang: Setara Press, 2016.
- Soekanto, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Keenam. Jakarta: UII-Press, 2004.
- Syafrudin, Ateng. *Butir-Butir Bahan Telahaan Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Untuk Indonesia*. Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- U, Humas Fakultas Hukum Universitas Patimura. “Mungkinkah Hukum Diberi Definisi?” Portal Unpatti, 2011.
- Utrecht, E., and Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Ke-Sembila. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1990.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77).
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316).
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4380).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1751).

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

C. Jurnal dan Publikasi

Adlhiyati, Zakki, and Achmad. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami : Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls." Undang: Jurnal Hukum 2, no. 2 (2019): 409–31. DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.

Ahmad, Al-Habsy. "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia." Petitum 9, No. 1 (2021): Hal. 51–65. DOI: 10.37394/23202.2023.22.21.

Amin, Subhan. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat." Jurnal El-Afkar 8, no. 1 (2019).

DOI:10.29300/jpkth.v8i1.1997.

- Anggraeni, Ricca. “Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 283–93. DOI:10.14710/mmh.48.3.2019.283-293.
- Arfa, Nys., Syofyan Nur, dan Tri Imam Munandar. “Pengaturan Peninjauan Kembali dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, No. 1 (2020): Hal. 102–12. DOI: <https://doi.org/10.22437/Jssh.V4i1.9774>.
- Arniti, Ni Komang Ayu, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. “Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Analogi Hukum* 1, No. 8 (2019): Hal. 265–70. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.265-270>.
- Bedner, Adriaan. “Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions.” *Hague Journal on the Rule of Law* 5, no. 02 (2013): 253–73. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1876404512001145>.
- Dani, Umar. “Ketidakteraturan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Atas Sikap Diam Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 451–67. DOI:10.31078/jk3035.
- Eka, Nur, Fatimatuz Zahro, dan Achmad Hasan Basri. “Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2023): Hal. 1–23.
- Eko Wahyudi, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Sebagai Hukum Yang Pancasila,” 2011, 299–307.
- Elvaindri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori. “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, No. 2 (2019): Hal. 252. DOI: <https://doi.org/10.22146/Jmh.32986>.
- Hidayat, Nur. “Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga.” *UIR Law Review* 01, no. 3 (2017): 191–200.
- Hambali, Azwad Rachmat. “Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konsep Negara Hukum.” *Kalabbirang Law Journal* 3, no. April (2021): 47–57. DOI: 10.35877/454RI.

- Hamdi, Mirja Fauzal. “Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 28, no. 3 (2019): 313–24. DOI: <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v4i1.2601>.
- Hastuty Christin Nalle, Junan, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju. “Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia Dan Implikasi Rekomendasinya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara.” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 271–79. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.768>.
- Hidayat, Nur. “Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga.” *UIR Law Review* 01, no. 3 (2017): 191–200.
- Holili, M. Yunus, and Winarto. “Kedudukan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia Terhadap Penganut Sistem Civil Law.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 9 (2024): 3718–26. DOI: <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1140>.
- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” *Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.
- Irvansyah, Andika Risqi. “Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja.” *APHTN-HAN* 1, No. 2 (2022). DOI: <https://doi.org/10.25216/Jhp.7.2.2018.213-236.1>.
- Januartha, I Made Dera, I made Suwitra, and Ni Made Puspasutari Ujjanti. “Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 268–74. DOI: <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8028.268-274>.
- Melisa Ayu Azhara dan Siti Ruhama Mardhatillah, “Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 256–76, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>.
- Norra, Azza Azka. “Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintah.” *Puslirbang Hukum Dan Peradilan* 3, No. 30 (2020): Hal. 141–54.
- Prasetyo Sutrisno, Slamet, Fadjrin Wira Perdana, Surnata Surnata, Yohan Wibisono, dan Bambang Setiawan. “Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, No. 12 (2021): Hal. 2109–2117. DOI:

<https://doi.org/10.36418/Jiss.V2i12.482>.

- Pudjiastuti, Diah. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia." *Res Nullius* 5, no. 2 (2023): 112–22. DOI: <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9430>.
- Roychan, Wahidur. "Konsep Dan Penyelesaian Asas Fiktif Positif Menurut Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023).
- Rudi, Jaga. "Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum Di Indonesia." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2023): 215–32. DOI: <https://doi.org/10.58192/populer.v2i4.1474>
- Sitorus, Syahrul. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet , Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)." *Jurnal Hikmah* 15, no. 64 (2018): 63–71. ISSN :1829-8419. 64
- Saiya, Aprillia Jultje, Saartje Sarah Alfons, Heillen Martha, and Yosephine Tita. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021): 618–26.
- Sarmadi, A Sukris. "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 331–43. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.58>.
- Simanjuntak, Enrico. "Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, No. 3 (2017): 379. DOI: <https://doi.org/10.25216/Jhp.6.3.2017.379-398>.
- . "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia The Roles of Case Law in Indonesian Legal System." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2018): 83–104. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1615>.
- . "Perkara Fiktif Positif Dan Permasalahan Hukumnya." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 379. DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.379-398>.
- Sumianto, Yulius, Sugeng Rusmiwari, and Dody Setyawan. "Implementasi Asas Pelayanan Publik Di Kelurahan Tunjungsekar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2, No. 1 (2013): 35–37. ISSN. 2088-7469
- Suryoputri, Syifaa Afelyna. "Analisis Tingkat Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Asas Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima." *Administrative Law & Governance Journal* 5, no. 3 (2022): 239–52. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v5i3.239-252>.

- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (2021): Hal. 2463–78. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Tjandra, Willy Riawan. "Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 3 (2011). ISSN: 2443-0994.
- Umam, Khairul, Ahari, and Riska Ari Amalia. "Rekonstruksi Prinsip Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila Khairul Umam." *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 185–97. DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.514>.
- Vranes, Enrich. "Lex Superior, Lex Specialis, Lex Posterior." *Heidelberg Journal of International Law* 65 (2005): 392–93.
- Warjiyati, Sri. "Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Justicia Islamica* 15, no. 1 (2018): 123–38. DOI: [10.21154/justicia.v15i1.1391](https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1391).
- Widyawati, Anis. "Dilema Penerapan Asas Retroaktif Di Indonesia." *Pedecta* 6, no. 2 (2011).
- Wulandari, Desy. "Pengujian Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Lex Renaissance* 5, No. 1 (2020): Hal. 32–56. DOI: <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol5.Iss1.Art3>.
- Yuliani, Erlin Triartha. "Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif dalam UU 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Konsep Fiktif Positif dalam UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6, No. 1 (2020): Hal. 64–82. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23441>.

D. Lainnya

- Adinda Zahra Noviyanti. "Ombudsman RI Ajak LSM Bersinergi." *Badan Otonom Pers Mahasiswa*, 2018. <https://wacana.org/ombudsman-ri-ajak-lsm-bersinergi>. Diakses pada 21 Maret 2024 Pukul 22.00 WIB.
- Jeda. "Mengenal Judex Facti Dan Judex Juris Dalam Praktik Pengadilan." *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-jude>. Diakses pada 10 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.
- Humas Fakultas Hukum Universitas Patimura. "Mungkinkah Hukum Diberi Definisi?" *Portal Unpatti*, 2011. <https://fh.unpatti.ac.id/mungkinkah-hukum-diberi-d>. Diakses pada 15 Februari 2024 Pukul 20.00 WIB.

- Humas Dirjen Peraturan Perundang-Undangan. “Koordinasi Rpepres Tentang Penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang Dianggap Dikabulkan Secara Hukum.” Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum, 2023. <https://fh.unpatti.ac.id/mungkinkah-hukum-diberi-d>. Diakses pada 10 Januari 2024 Pukul 21.00 WIB.
- Kastanya, Efraim Jord. “Perbedaan Peraturan dan Keputusan.” Hukum Online, 2023. <https://fh.unpatti.ac.id/mungkinkah-hukum-diberi-d>. Diakses Pada 14 Desember 2023 Pukul 08.00 WIB.
- MKRI, Humas. “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun.” Mahkamah Konstitusi RI, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=1>. Diakses pada 05 Oktober 2023 Pukul 15.00 WIB.
- Waruwu, Riki Perdana Raya. “Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma.” JDIH Mahkamah Agung, 2018. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail>. Diakses pada 10 Januari 2024 Pukul 22.00 WIB.